



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 19/01/2025
 Reviewed : 22/01/2025
 Accepted : 21/01/2025
 Published : 28/01/2025

Lulu¹
 Aquarini²

ANALISIS KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Abstrak

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan kinerja yang dimaksud juga berperan sebagai alat kendali peningkatan kinerja dan perbaikan di masa yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi LAKIP pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya nilai LAKIP pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah di pengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas perencanaan, pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kebijakan pemerintah, pengawasan dari lembaga eksternal, serta harapan dan tuntutan masyarakat. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 menunjukkan hasil yang "Baik" dengan nilai keseluruhan 65,90 dari nilai maksimal 100, menempatkannya dalam kategori predikat "B". Efektifitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang optimal masih sangat rendah, baik dari jumlah maupun kompetensinya.

Kata kunci: Kinerja; Dinas Kesehatan; Laporan Akuntabilitas

Abstract

The Central Kalimantan Provincial Health Office prepares and presents performance reports as a form of accountability for the implementation of duties and functions. The performance report in question also serves as a control tool for performance improvement and improvement in the future. This research is qualitative and descriptive, with the aim of explaining performance achievements based on the results of the LAKIP evaluation at the Central Kalimantan Provincial Health Office task force in 2023 and revealing the problems that cause the low LAKIP score in the Central Kalimantan Provincial Health Office task force. The performance achievements of the Central Kalimantan Provincial Health Office are influenced by internal factors such as the quality of planning, the implementation of performance measurement and evaluation of internal performance accountability, as well as external factors such as government regulations and policies, supervision from external institutions, as well as community expectations and demands. The analysis of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) at the Central Kalimantan Provincial Health Office for 2023 shows a "Good" result with an overall score of 65.90 out of a maximum value of 100, placing it in the "B" predicate category. The effectiveness of the use of Human Resources (HR) and the budget in an effort to achieve optimal performance of the Central Kalimantan Provincial Health Office is still very low, both in terms of number and competence.

Keywords: Performance; Health Office; Accountability Report

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia dan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupan secara layak, sehingga kesehatan merupakan bagian penting dari

^{1,2)} Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
 email: lulu.jaya417@gmail.com¹, aquariniedward@gmail.com²

kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Selain itu setiap individu juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, tetapi harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakannya, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin dan menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara. Seiring berjalannya waktu pelayanan kesehatan semakin hari semakin dibutuhkan karena saat ini Indonesia menghadapi beban ganda penyakit, di satu sisi terjadi peningkatan jumlah penyakit tidak menular, namun disisi lain kematian akibat penyakit menular juga masih tinggi (Nurdayanti, 2022).

Pelayanan kesehatan sebagai layanan publik bertujuan untuk: Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, Mengatur hak dan kewajiban masyarakat, Mewujudkan pelayanan publik yang baik. Pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: mudah dicapai, dapat diterima dan wajar, mudah dijangkau. (Kemenkes, 2022). Pelayanan dalam bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk konkret pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Kesehatan merupakan sebuah investasi bagi negara, dalam artian hanya manusia yang sehat baik secara jasmani maupun rohani yang dapat melakukan pembangunan kelak. Untuk mendapatkan tujuan nasional diperlukan sumber daya manusia yang tangguh, mandiri dan berkualitas. Hal ini sangat diperlukan untuk menghadapi era glonalisasi karena penduduk yang sehat bukan saja akan menunjang keberhasilan program pendidikan tetapi juga meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan pendapatan (Hidayat, 2021).

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah bagi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan strategis instansi. Selain mendorong pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, LAKIP juga menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Analisis terhadap akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Analisis terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilaksanakan secara profesional dan penuh tanggungjawab. Hal tersebut dapat memberikan stimulasi bagi para pejabat untuk terus berusaha melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyusun dan menyajikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan kinerja yang dimaksud juga berperan sebagai alat kendali peningkatan kinerja dan perbaikan di masa yang akan datang. Tabel 1 menyajikan nilai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah sudah terbilang baik dengan kategori nilai "B" meningkat bila dibandingkan dengan nilai capai LAKIP tahun 2022 dengan kategori cukup "CC". Hal ini mengindikasikan bahwa setiap program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan telah terealisasi dengan baik. Capaian hasil evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Hasil evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,75
2	Pengukuran Kinerja	30	19.05
3	Pelaporan Kinerja	15	9.00
4	Evaluasi Akuntabilitas KinerjaInternal	25	13.10
Jumlah		100	65,90 (B)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Akuntabilitas didalam sektor publik digambarkan sebagai hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah berperan sebagai agen yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh masyarakat sebagai prinsipal, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hanya diwakilkan. Akuntabilitas yang dimaksud yaitu kemampuan untuk menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban seluruh aktivitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah finansial apakah sudah ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*) melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor publik dalam menghasilkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Kinerja instansi pemerintah dapat dikatakan baik jika mampu merealisasikan rencana anggaran dalam memenuhi tujuan yang ditetapkan dengan berpedoman pada standar pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Crosswell (2018)*, yang merupakan metode evaluasi berbasis kinerja dengan memadukan berbagai sumber data dan perspektif. Pendekatan ini mengutamakan kolaborasi, triangulasi data, dan analisis lintas sektor untuk memahami kinerja organisasi secara komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, *Crosswell* digunakan untuk menganalisis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil evaluasi LAKIP pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 serta mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya nilai LAKIP pada satker Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hasil analisa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 di ketahui capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun sebelumnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			
				Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	70,19	70,27	100.1	Sangat Tinggi
2	Perbaikan gizi masyarakat	Persentase Balita Wasting	Persen	7,5	5.5	126.6	Sangat Tinggi
3		Persentase	Persen	18,4	12.1	134.2	Sangat

		Balita Stunting					Tinggi
4	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Indeks	6,9	12,69	16.08	Sangat Rendah
5		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Indeks	131	179,3	63,12	Rendah

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2024

Dari tabel di atas diketahui capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 ada indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti (1) Angka Usia Harapan Hidup dengan kriteria sangat tinggi (2) Persentase Balita Wasting dengan kriteria sangat tinggi dan (3) Persentase Balita Stunting dengan kriteria sangat tinggi. Adapun indikator yang belum mencapai target adalah (1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup dengan kriteria sangat rendah dan (2) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dengan kriteria rendah.

Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil analisis LAKIP.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal ini menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan berkelanjutan dalam akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Faktor Internal

Secara internal, faktor-faktor utama yang berpengaruh adalah kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kualitas perencanaan kinerja yang baik mencerminkan kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menetapkan indikator kinerja yang relevan dan realistis. Pelaksanaan pengukuran kinerja yang akurat dan konsisten memastikan bahwa data yang digunakan untuk menilai kinerja adalah valid dan dapat diandalkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif menunjukkan komitmen dinas kesehatan untuk terus memperbaiki dan mempertahankan standar kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan:

“Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah belum pernah melakukan reuiu dokumen perencanaan seperti Renstra hal ini menyebabkan apabila ada perubahan-perubahan baik target capaian, perubahan anggaran atau perubahan kegiatan serta sub kegiatan tidak akan terakomodir sehingga waktu menghitung capaian kinerja jadi tidak akurat”.

Reuiu Rencana Strategis (Renstra) memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

- Memudahkan pengukuran dan mempertajam kualitas pencapaian outcome
- Mengkaji ulang perencanaan strategis
- Mendukung kinerja dan pencapaian target
- Membantu merespon tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis

Kemudian wawancara selanjutnya memberikan fakta bahwa:

“Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi, masih dilakukan secara manual sehingga kedepannya sudah mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi”

Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengukur kinerja pegawai secara objektif dan mengoptimalkan tugas rutin, mengurangi administrasi, dan meningkatkan produktivitas. Teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan manajemen kinerja dalam organisasi modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era modern tidak terlepas dari fungsinya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, dan menyebarluaskan informasi. Teknologi informasi memungkinkan perluasan jangkauan kinerja yang lebih baik dan lebih efisien. Dengan penerapan teknologi informasi, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan pengenalan yang lebih luas dan efektif.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi regulasi dan kebijakan pemerintah, pengawasan dari lembaga eksternal, serta harapan dan tuntutan masyarakat. Regulasi dan kebijakan pemerintah memberikan kerangka kerja yang harus diikuti dinas kesehatan dalam melaksanakan dan melaporkan kinerjanya. Pengawasan dari lembaga eksternal, seperti auditor independen atau badan akreditasi, memastikan bahwa rumah sakit mematuhi standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, harapan dan tuntutan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan transparan mendorong dinas kesehatan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Mengevaluasi penerapan SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil analisa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan, untuk tahun 2023. Evaluasi ini menghasilkan nilai keseluruhan 65,90 dari 100, yang termasuk dalam kategori predikat B (baik). Penilaian ini terbagi dalam beberapa komponen utama: penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,75
2	Pengukuran Kinerja	30	19.05
3	Pelaporan Kinerja	15	9.00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13.10
Jumlah		100	65,90 (B)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Berikut merupakan rincian penilaian yang diperoleh pada evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai sebesar 24,75 dari nilai maksimal 30. Nilai ini menunjukkan bahwa komponen perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada di kategori predikat A (Memuaskan).

Hasil tersebut diperoleh dari simpulan hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja dengan agregasi penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu penilaian pemenuhan dokumen perencanaan, penilaian kualitas, dan penilaian implementasi. Hasil penilaian pemenuhan dokumen perencanaan menunjukkan nilai sebesar 6,00 yang berada di kategori AA (sangat memuaskan). Hasil evaluasi kualitas dokumen Perencanaan kinerja menunjukkan nilai 7,25 dari nilai maksimal sebesar 9 dengan kategori predikat A (memuaskan). Hasil evaluasi penilaian implementasi menunjukkan nilai sebesar 11,50 dari nilai maksimal 15,00 dengan kategori BB (sangat baik).

2. Pengukuran kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, hasil evaluasi atas pengukuran kinerja mendapatkan nilai sebesar 19,05 dari nilai maksimal 30. Nilai ini menunjukkan bahwa komponen pengukuran

kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada di kategori predikat B (baik).

Hasil tersebut diperoleh dari simpulan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan agregasi penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu Pelaksanaan Pengukuran Kinerja, Kualitas Pengukuran, dan Implementasi Pengukuran Kinerja. Hasil Pelaksanaan Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar 5,20 dari target ideal sebesar 6,00 yang berada di kategori A (memuaskan). Hasil evaluasi Kualitas Pengukuran kinerja menunjukkan nilai 7,35 dari target ideal sebesar 9,00 dengan kategori predikat A (memuaskan). Hasil evaluasi Implementasi Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,50 dari nilai maksimal 15,00 dengan kategori C (kurang).

3. Evaluasi atas pelaporan kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, hasil evaluasi atas pelaporan kinerja mendapatkan nilai sebesar 9,00 dari nilai maksimal 15,00. Nilai ini menunjukkan bahwa komponen pelaporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada di kategori predikat CC (cukup).

Hasil tersebut diperoleh dari simpulan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan agregasi penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu Pemenuhan Pelaporan Kinerja, Kualitas Dokumen Laporan Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hasil pelaksanaan pemenuhan pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar 2,30 dari target ideal sebesar 3,00 yang berada di kategori BB (sangat baik). Hasil evaluasi Kualitas Dokumen Laporan Kinerja menunjukkan nilai 2,70 dari nilai maksimal 4,50 dengan kategori predikat CC (cukup). Hasil evaluasi pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar 3,80 dari nilai maksimal 7,50 dengan kategori CC (cukup).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, hasil evaluasi atas pelaporan kinerja mendapatkan nilai sebesar 13,10 dari nilai maksimal 25,00. Nilai ini menunjukkan bahwa komponen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berada di kategori predikat CC (cukup).

Hasil tersebut diperoleh dari simpulan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan agregasi penilaian atas tiga sub-komponen, yaitu Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Kualitas Evaluasi, dan Pemanfaatan Evaluasi. Hasil Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar 2,90 dari nilai maksimal 5,00 yang berada di kategori CC (cukup). Hasil evaluasi Kualitas Evaluasi menunjukkan nilai 5,45 dari nilai maksimal 7,50 dengan kategori predikat BB (sangat baik). Hasil evaluasi Pemanfaatan Evaluasi menunjukkan nilai sebesar 4,75 dari nilai maksimal 12,50 dengan kategori C (kurang).

Mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya (anggaran dan SDM) oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai target kinerjanya.

1. Efektifitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Organisasi publik akan dapat berjalan secara maksimal apabila didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang baik dan berkualitas. Begitu juga dengan penyusunan laporan kinerja baik SAKIP maupun LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya membutuhkan pejabat dan pegawai yang mempunyai kompetensi yang baik dalam mengelola dan menyusun laporan kinerja. Dalam penelitian ini, penulis menjumpai beberapa permasalahan terkait SDM yang mengelola laporan kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kekurangan jumlah pegawai khususnya yang menangani pengelolaan laporan dan capaian kinerja Dinas Kesehatan akan mengakibatkan terhambatnya proses penyusunan dan analisa capaian kinerja yang berakibat pada rendahnya penilaian LAKIP. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota tim “penyusunan LAKIP” dalam kutipan wawancara berikut ini.

“kami ada bermasalah pada jumlah SDM. Padahal ada SK tim penyusunan LAKIP yang berjumlah 9 orang yang ttd kadis tapi yang bekerja menyusun dan yang melakukan analisa capaian kinerja Dinkes 2 orang saja.”

Permasalahan yang sama diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Penyusunan Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah terkait keterbatasan jumlah SDM:

“di sub bagian penyusunan program jumlah orangnya terbatas dengan beban kerja yang cukup banyak sehingga kami kesulitan dalam membantu pengerjaan laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.”

Dalam penelitian ini, penulis menjumpai permasalahan terkait SDM yang mengelola pelaporan kinerja. Diantaranya semua tenaga di sub bagian penyusunan program rangkap pekerjaan yang berpengaruh pada capaian kinerja pegawai tersebut. Perangkapan jabatan tersebut menjadi masalah dari kekurangan pegawai agar seluruh pekerjaan di satker dapat dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi hal tersebut justru dapat mengurangi kinerja pegawai karena tidak fokus dalam tugas utamanya (Setyawan, A. 2016). Permasalahan tersebut diungkapkan oleh tim penyusunan LAKIP dalam kutipan wawancara berikut ini.

“kita (kami) terkendala masalah SDM. SDM kita (kami) itu kurang, jadi ada yang merangkap. Pengelola evaluasi rangkap mengerjakan LAKIP ada juga yang mengerjakan data dan informasi merangkap mengerjakan LAKIP.”

Permasalahan SDM begitu penting dan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan maupun tenaga yang memang khusus mengelola masalah kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Perlu ada terobosan yang baru untuk menanggulangi masalah kekurangan SDM tersebut.

Menurut Ariesta (2013), mengatakan apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang diisyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akibatnya kualitasnya menjadi buruk. Menurut penelitian Dewi, et al (2015) mengemukakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Efektifitas penggunaan sumber daya anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan pentingnya kualitas anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah baik berupa perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan evaluasi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan tersebut diungkapkan oleh tim penyusunan LAKIP dalam kutipan wawancara berikut ini.

“anggaran kita sering kali mengalami revisi yang bisa berpengaruh terhadap capaian kinerja Dinkes. Kemudian penyerapan anggaran Dinkes banyak terjadi pada TW IV yang menyebabkan serapan anggaran tidak proporsional setiap triwulannya.”

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi dan rendahnya kualitas anggaran akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kata lain apabila kualitas anggaran tinggi maka kualitas kinerja akan meningkat sebaliknya apabila kualitas anggaran rendah maka kualitas kinerja juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas anggaran (perencanaan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan evaluasi anggaran) maka akan tercapai kinerja Dinas Kesehatan yang baik.

SIMPULAN

1. Berdasarkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ada 3 (tiga) indikator yang telah atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), persentase balita *stunting* dan persentase balita *wasting*. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
2. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas perencanaan, pelaksanaan pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta faktor eksternal seperti regulasi dan kebijakan pemerintah, pengawasan dari lembaga eksternal, serta harapan dan tuntutan masyarakat.

3. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 menunjukkan hasil yang “Baik” dengan nilai keseluruhan 65,90 dari nilai maksimal 100, menempatkannya dalam kategori predikat “B”.
4. Efektifitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran dalam upaya pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah yang optimal masih sangat rendah, baik dari jumlah maupun kompetensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. M. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Grobogan). Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Azwar, A. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa
- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2018). Efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada pemerintahan daerah kota Bandung (studi kasus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 93-103. <https://doi.org/10.28932/jam.v9i2.469>
- Creswell, John W. Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Hidayat, E. W. (2021). Efektifitas pelayanan publik dasar bidang kesehatan di Kabupaten Lebak. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya. Jakarta.
- Maolani, D. Y., Septiadi, A., Dewi, A. P., & Haque, D. R. D. (2023). Peran system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dalam meningkatkan kinerja pegawai instansi pemerintah. *Distingi: Journal of Digital Society*, 1(2). <https://jurnal.panengen.com/index.php/djods/article/view/31>
- Ni Kadek Yuni Gitasih, I Made Sumada, & I Wayan Astawa. (2023). Pengaruh E-Sakip terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 1057-1064.
- Nurdayanti, A (2022). Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*Studi Penerapan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Berau Tahun 2020-2021*). Thesis, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Pemerintah Pusat, & Dewan Perwakilan Rakyat. (2014). Peraturan presiden tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. In Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (pp. 1-44).
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.
- Taufik, T. (2013). Peran monitoring dan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199-212.